

**INKONSISTENSI ARAH POLITIK DI INTERNAL
ORGANISASI PWNU ACEH**



Disusun Oleh:

PUTRI LATIFAH

NIM. 170801030

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

“INKONSISTENSI ARAH POLITIK DI INTERNAL ORGANISASI

PWNU ACEH”

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Politik

Oleh :

PUTRI LATIFAH

NIM. 170801030


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.
NIP. 197702191998032001


Melly Masni, M/IR
NIP. 198812072018032001

INKONSISTENSI ARAH POLITIK DI INTERNAL ORGANISASI PWNu ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Pemerintahan Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 04 Oktober 2022
08 Rabiul Awal 1444

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



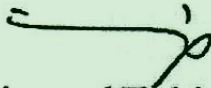
Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001

Sekretaris,



Melly Masni, M. IR
NIP. 198812072018032001

Penguji I,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Penguji II,

Aklima, S.Fil.I., M.A.
NIP. 198810062019032009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Putri Latifah

Nim : 170801030

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Inkonsistensi Arah Politik Di Internal Organisasi PWNU
Aceh

Pembimbing I : Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.

Pembimbingan II : Melly Masni, M.IR

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini,saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri kara ini da mampu memperanggung jawabkan atas kareya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Putri Latifah)

ABSTRAK

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, politik dan sosial. Lainnya. Sejak dari pendiriannya, NU hadir sebagai respon terhadap perkembangan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa dalam menghadapi kolonialisme Belanda serta pertentangan tajam di antara para pengikut aliran atau pemikiran Islam di Indonesia, dan juga berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Oleh karena itu, penulis kemudian tertarik untuk melihat bagaimana NU merespon persoalan-persoalan politik yang terjadi di Indonesia dengan membandingkan respon organisasi NU pada tingkat nasional dengan NU pada tingkat cabang, dikarenakan pada beberapa kesempatan, terdapat perbedaan respon yang ditunjukkan oleh NU pada level nasional dengan cabang NU. Skripsi ini ingin menjelaskan tentang pandangan NU Aceh mengenai politik tingkat tinggi NU dan pandangan NU Aceh mengenai berbagai isu dalam kontestasi politik nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mencari dan menganalisis data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai politik tingkat tinggi, NU Aceh memiliki pandangan serupa dengan NU di tingkat nasional di mana, politik tingkat tinggi terdiri dari tiga bagian yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan dan etika politik. Politik kebangsaan dipahami sebagai politik yang mencintai tanah air, menjunjung tinggi kedaulatan bangsa Indonesia dan mempertahankan NKRI. Politik kerakyatan merupakan politik yang melihat rakyat atas hak-hak kewajiban rakyat, melindungi dan membela rakyat, sedangkan etika politik adalah cara melihat berperilaku baik (akhlaqul karimah) dalam bersosial di masyarakat. Hasil penelitian yang kedua adalah bahwa dalam menyikapi ke empat isu yang ada (Isu Gerakan Separatisme, Isu Keterlibatan NU dalam Politik Praktis, Isu Pembentukan Negara Khilafah, Isu Kasus Penistaan Agama), NU di tingkat Nasional dan di tingkat provinsi Aceh memiliki pandangan yang sama dalam isu, Keterlibatan NU dalam Politik Praktis, dan Isu Kasus Penistaan Agama namun sedikit berbeda pada isu, Isu Gerakan Separatisme, dan Pembentukan Negara Khilafah.

Kata Kunci : Nahdlatul Ulama (NU), politik tingkat tinggi NU, Kontestasi Politik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Inkonsistensi Arah Politik Di Internal Organisasi PWNNU Aceh*”. Shalawat beriringi salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah shallahu’alaihiwassalam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis dari berbagai pihak yang sifatnya membangun ,agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar- besarnya kepadanya :

1. Terima Kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendoakan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr.Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry beserta jajarannya.

5. Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku ketua prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, M.A, selaku sekretaris prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku penasehat akademik dan beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar - besarnya kepada Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D Selaku pembimbing I dan Melly Masni, M, IR selaku pembimbing II skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada teman-teman seperjuangan atas motivasi, penyemangat dari kalian dan terima kasih kepada diri sendiri yang sudah bertahan sampai ketahap menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis selama proses penelitian ini berlangsung.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantian membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 26 Juli 2022
Penulis,

Putri Latifah
NIM: 170801030

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 1 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 11 |
| 2.2. Landasan Teoritis | 17 |
| 2.2.1 Organisasi Berbasis Keagamaan (Faith-Based Organization) | 17 |
| 2.2.2 Konsep Pelayanan Sosial Dalam Organisasi Agama | 20 |
| 2.2.3 Ideologi | 23 |
| 2.2.4 Ahlusunnah Waljama'ah | 25 |
| 2.2.5 Politik Tingkat Tinggi (High Politik) | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| 3.1. Metode Penelitian | 32 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 33 |
| 3.3. Lokasi Penelitian | 33 |
| 3.4. Jenis Penelitian | 34 |
| 3.5. Metode Mengumpulan Data | 34 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| 3.7. Teknis Analisis Data | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 40 |
| 4.1. Sejarah Lahirnya Nadhlatul Ulama | 40 |
| 4.2. Sejarah Nadhlatul Ulama (NU) Di Aceh | 46 |
| 4.3. Politik Tingkat Tinggi NU | 51 |
| 4.4. Pandangan NU Aceh Terhadap Berbagai Isu Dalam Kontestasi Politik Nasional | 54 |
| 4.4.1 Isu Gerakan Separatisme | 55 |
| 4.4.2 Keterlibatan NU Dalam Politik Praktis | 57 |
| 4.4.3 Pembentukan Negara Khilafah | 59 |
| 4.4.4 kasus penistaan agama | 62 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 65 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 65 |
| 5.2 Saran..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Nahdlatul Ulama (NU) yang secara bahasa berarti kebangkitan ulama merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di kampung Kertopaten Surabaya. Organisasi NU sendiri merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, politik dan sosial. Pendirian NU pada tahun 1924 diinisiasi oleh KH.Hasyim Asy'ari dan KH. Wahhab Hasbullah sebagai respon terhadap perkembangan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa dalam menghadapi kolonialisme belanda serta pertentangan tajam di antara para pengikut aliran atau pemikiran Islam di Indonesia, dan juga berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu.

Sebelum adanya organisasi NU pada tahun 1914 pernah berdirinya sebuah komunitas bernama Nahdhatul Watan yang berarti “Kebangkitan tanah air” kemudian Taswirul Afkar yang berarti “Representasi gagasan-gagasan” pada 1918, hingga kemudian disusul berdirinya Nahdhatut Tujjar (kebangkitan usahawan). Badan-badan ini dibentuk sebagai perhatian para ulama dan pesantren untuk menghimpun kegiatan bersama serta mengembangkan kaum muslimin ketika itu. Himpunan para ulama inilah yang disebut sebagai pelopor penting lahirnya organisasi NU.¹

¹ M. Ali Haidar, NU dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fiqih dalam Politik, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 45.

Pada tahun 1924 juga, di Indonesia K.H Wahab Chasbullah mulai memberikan gagasannya kepada K.H. Hasyim Asyari mengenai pentingnya sebuah organisasi Islam, dalam hal ini NU, untuk didirikan. Pada tahun yang sama, KH Wahab Hasbullah meminta restu kepada guru sekaligus mentor pergerakan, yaitu Kiyai Hasyim, untuk membuat organisasi. Akan tetapi, usulan ini tidak langsung disetujui. Kiyai Hasyim mewanti-wanti untuk menguatkan konsep, membangun jaringan dan mensosialisasikan kepada seluruh ulama-ulama yang mengasuh pesantren di kawasan nusantara.

Hasilnya, Kiyai Wahhab melakukan perjalanan selama dua tahun, sejak 1924 hingga 1926. Kiyai Wahhab menggerakkan teman seperjuangan dan jaringan pesantren di Lombok, Mataram, Banjarmasin, Sulawesi, Sumatera dan pelosok Jawa. Kawan-kawan Kiyai Wahhab semasa di tanah Hijaz (Makkah-Madinah) juga mendukung dengan penuh semangat, karena sebelumnya telah satu visi perjuangan. Bahkan, jaringan ulama Jawa yang menjadi tulang punggung Islam Nusantara, juga turut menjadi bagian dari lingkaran pengetahuan yang telah dibangun oleh Kiyai Wahhab. Setelah semuanya matang, NU dideklarasikan pada 30 Januari 1926, dengan persetujuan dan dukungan dari ulama Nusantara.²

Kiyai Wahhab menggerakkan teman seperjuangan dan jaringan pesantren di Lombok, Mataram, Banjarmasin, Sulawesi, Sumatera dan pelosok Jawa, untuk membuat sebuah organisasi di Indonesia yang disebut dengan organisasi

² Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 25.

Nahlatul Ulama (kebangkitan ulama). Pendiriannya ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H2 di kampung Kertopaten Surabaya. Nahdatul Ulama sendiri didirikan oleh 13 ulama besar yaitu KH. Hasyim Asy'ari, sebagai pendiri NU dan Rais akbar (1926-1947), KH Bisri Syamsuri sebagai pendiri NU & Rais 'am (1971-1980), K.H Abdullah Wahab Chasbullah sebagai pendiri NU & Rais 'am (1947-1971), K.H Abdul Chamid sebagai pendiri NU & pengusul nama "Nuhudhul Ulama", KH. Ridwan Abdullah sebagai pencipta lambang NU, KH Abdul Halim, K.H Mas Alwi bin Abdul Aziz, sebagai pencipta nama "Nahdhatul Ulama", KH Ma'shum, K.H A Dachlan Achmad, sebagai wakil rais pertama (1926), KH Nachrawi Thahir sebagai A'wan pertama (1926), K.H R Asnawi sebagai Mustasyar pertama (1926), Syekh Ghanaim (berasal dari Mesir dan tinggal di surabaya) sebagai Mustasyar pertama (1926), serta K.H Abdullah Ubaid sebagai pendiri dan a'wan pertama³

Berdirinya NU sendiri sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* (aswaja) yang menjadi ideologi yang diusung NU. Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma' (keputusan-keputusan para ulama' sebelumnya) serta Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita al-Qur'an dan Hadits). Dengan haluan ideologi ahlus sunnah waljamaah ini lahir dengan alasan yang mendasar. Pertama, kekuatan penjajah belanda untuk meruntuhkan potensi islam telah melahirkan rasa tanggung jawab alim ulama menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran islam. Kedua, rasa tanggung jawab alim ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan

³ <https://www.abusyuja.com/2020/04/struktur-pengurus-nahdlatul-ulama-pertama-kali.html>

kemerdekaan dan membebaskan dari belenggu penjajah. Ketiga, rasa tanggung jawab alim ulama menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia.⁴ Dalam menjalankan paham *ahlusunah waljamaah*, pada dasarnya NU menganut 5 prinsip. Yakni, at-Tawazun (keseimbangan), at-Tasamuh (toleran), at-Tawasuth (moderat), at-Ta'adul (patuh pada hukum), dan amar makruf nahi mungkar.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, NU menjadi salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik tersendiri.⁶ Menurut Denny JA, berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh lembaga Survey Lingkaran (LSI) pada tahun 2019, survei yang melibatkan sebanyak 1.200 responden ini dilakukan melalui wawancara secara langsung yang dipilih menggunakan *multistage random sampling* dari total responden, komposisi pemilih Muslim sebesar 87,8 persen, sedangkan pemilih minoritas 12,2 persen. Sedangkan margin of error atau tingkat kesalahan survey ini berjumlah pada kisaran 2,9 persen. Dari hasil keseluruhan survei tersebut menetapkan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) berjumlah 49,5%,⁷ selain itu menurut survey IndoBarometer, menyebutkan 75 persen mengaku warga nadliyin artinya jumlah warga NU sekitar 143 juta penduduk.⁸

⁴ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hal. 67.

⁵ Zainil Ghulam, Achmad Farid, *Ideologisasi Identitas Aswaja an-Nahdliyah di LP. Ma'arif NU Lumajang, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam; Volume 12, Nomor 2, Agustus 2019 p-ISSN: 2085-6539; e-ISSN: 2242-4579.*

⁶ Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Duta Aksara

⁷ <https://www.suarainvestor.com/survei-lsi-denny-ja-nu-sebagai-ormas-terbesar-yang-tak-terdaningi/>

⁸ <https://hasanuddinali.com/2017/01/19/menakar-jumlah-jamaah-nu-dan-muhammadiyah/>

Dalam kaitannya dengan politik, sebenarnya keterlibatan pertama kali NU dengan partai politik adalah dengan Masyumi ketika memberikan dukungan secara organisasi terhadap pendirian Masyumi sebagai partai politik islam pada tanggal 11 Oktober 1945. Keterlibatan NU dalam dunia politik mulai menurun ketika NU bergabung dalam Masyumi sebagai partai politik, namun kedudukan NU dalam kepengurusan Masyumi tidak terwakili di badan eksekutif dan hanya menduduki dewan syuro yang tidak banyak menentukan kebijakan partai. Bahkan, akhirnya posisi NU sebagai dewan syuro diturunkan, hingga kedudukannya hanya menjadi penasehat partai. Keretakan di tubuh Masyumi akibat berbagai polemik membuat NU akhirnya memutuskan untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1952.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) dimana 'nasionalis' sendiri diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), 'agama' diwakili oleh Partai Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mewakili 'komunis'. Setelah itu, NU juga maju ke panggung politik praktis bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP)⁹ pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru. NU pun sempat mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, pada Muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk kembali ke Khittah 1926, yaitu untuk tidak lagi berpolitik praktis. Khittah NU sendiri bermakna garis perjuangan NU yang secara normatif

⁹ Delian Noer, *Gerak Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), Hal. 235.

didefinisikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku bagi warga NU di dalam berkhidmat di segala aspeknya.¹⁰ Namun demikian, setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Meskipun telah berkomitmen untuk kembali ke Khittah 1926, sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang sangat besar dan dianggap memiliki pengaruh di pentas nasional, NU terkadang tetap harus merespon persoalan-persoalan politik. Hal ini tampaknya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dikarenakan persoalan-persoalan krusial yang menyangkut kemaslahatan umat banyak pula yang berada dalam wilayah politik. Yang pasti, setelah memutuskan kembali kekhittahnya, NU tidak secara formal memposisikan diri sebagai organisasi politik. Namun terlihat dalam berbagai kesempatan bahwa NU terkadang ikut merespon beberapa persoalan politik.¹¹ Hal ini menurut KH. Ahmad Mustofa Bisri, Rais Aam Nahdlatul Ulama periode 2015-2020, masih merupakan sesuatu yang wajar, asalkan NU tidak meninggalkan peran utamanya dalam bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Menurut KH. Ahmad Mustofa Bisri pula, setidaknya ada 3 jenis politik dalam pemahaman NU, yaitu politik kebangsaan, politik kerakyatan dan politik kekuasaan yang sering pula dikenal dengan sebutan 'Politik Tingkat Tinggi NU'. Sejak pendiriannya, NU memang sudah ikut terlibat dalam berbagai aktifitas politik, terutama dalam politik kebangsaan. Hal ini dilatarbelakangi pandangan NU yang sangat menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik

¹⁰ https://www.setneg.go.id/baca/index/khittah_nu_permanen_untuk_perbaikan_umat

¹¹ A. Qodri A. Azizy, dkk. Jejak-jejak Islam Politik; Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia. (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004), Hal. 73.

Indonesia (NKRI). Nampak tilas gerakan NU sendiri diawali dengan munculnya ideologi Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia. Peranan NU termuat dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sila pertama peranannya adalah telah mempererat bangsa Indonesia dengan toleransi terhadap agama selain agama islam.¹²

Adapun mengenai politik kerakyatan NU, KH. Ahmad Mustofa Bisri menjelaskan bahwa hal tersebut berarti NU berperan pula dalam politik membela rakyat. Ia memberikan pengandaian, misalnya ketika dipercaya menjadi anggota legislatif, maka perwakilan NU harus betul-betul menjadi wakil rakyat, bukan mewakili kepentingan diri pribadi.

Adapun pemahaman mengenai peran NU dalam politik kekuasaan, NU menilai bahwa berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru, merupakan sebuah momentum bagi NU untuk melakukan pembenahan diri. Selama rezim orde baru berkuasa, NU cenderung dipinggirkan oleh penguasa saat itu. Ruang gerak NU pada masa orde baru juga dibatasi, terutama dalam hal aktivitas politiknya. Oleh karena itu, pada masa reformasi seperti inilah peluang NU untuk memainkan peran pentingnya di Indonesia kembali terbuka. NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, pada awalnya lebih memilih sikap netral menjelang mundurnya Soeharto. Namun sikap ini kemudian berubah, setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sebuah pandangan untuk merespon proses reformasi yang berlangsung di Indonesia, yang dikenal dengan

¹² Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 53.

“Refleksi”.¹³ Pandangan bahwasannya NU merupakan pribumisasi Islam memiliki urgensi terhadap dinamika sosial-kemasyarakatan, mengadopsi apa yang layak dalam tradisi untuk dikembangkan demi kepentingan masa kini dan masa depan merupakan langkah pemaknaan yang paradigmatis. Karena sebuah transformasi, baik pemikiran maupun sosial, harus beranjak dan menimba inspirasinya dari tradisi. Maka, diperlukan ikhtiar untuk menggali hal-hal dalam tradisi yang bisa mendukung transformasi.¹⁴

Berdasarkan tiga pendekatan politik NU yang dikemukakan oleh KH. Ahmad Mustofa Bisri atau kerap disapa Gus Mus, penulis kemudian tertarik untuk melihat bagaimana NU merespon persoalan-persoalan politik yang terjadi di Indonesia. Selain itu, menarik pula untuk membandingkan respon organisasi NU pada tingkat nasional dengan NU pada tingkat cabang, dikarenakan pada beberapa kesempatan, terdapat perbedaan respon yang ditunjukkan oleh NU pada level nasional dengan cabang NU lainnya. Misalnya, pada kasus penistaan Agama oleh mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melalui salah satu surah yang terdapat dalam Al-Qur'an pada tahun 2018, KH. Said Agil Siradj selaku Ketua Umum PBNU, melarang warga NU untuk terlibat dalam demonstrasi pada aksi 212 atas dasar alasan toleransi. Hal tersebut telah menyebabkan seluruh elemen pengurus NU di kabupaten Aceh Barat Daya (Abda) dikabarkan membubarkan diri lantaran merasa kecewa terhadap Ketua Umum PBNU yang

¹³ M, Mukhsin Jamil, dkk, Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Im, Departemen Agama Republik Indonesia, 2007), Hal. 319.

¹⁴ Hartati dan Hambali. “Transformasi NU Di Indonesia: Upaya Menghilangkan Polemik Di Tengah Perubahan Politik”. Substantia, Volume 20 Nomor 1, April 2018 (Banda Aceh, 2018), hal.40

dituding mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam pemilihan gubernur DKI tahun 2017.¹⁵

Kemudian dalam pemilihan presiden 2019, menurut Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang merupakan salah satu tokoh NU nasional, berdasarkan hasil survey internal yang dilakukan, sebanyak 98% warga NU memilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin sendiri merupakan salah satu pengurus besar NU. Akan tetapi, hasil pemilihan presiden 2019 di provinsi Aceh menunjukkan bahwa pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin justru kalah telak, di mana pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih kemenangan dengan suara mencapai 85,59 persen. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pandangan Nahdlatul Ulama Aceh mengenai Politik Tingkat Tinggi NU dan Berbagai Isu dalam Kontestasi Politik Nasional”**.

¹⁵ Jawa post.com, 2017, *Kader NU Aceh Mundur Massal, Ini Jawaban Said Aqil*, senin 17 april.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan NU Aceh mengenai politik tingkat tinggi NU?
2. Bagaimana pandangan NU Aceh mengenai berbagai isu dalam kontestasi politik nasional?

1.3.Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui, bagaimana pandangan NU Aceh mengenai politik tingkat tinggi NU?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan NU Aceh mengenai isu dalam kontestasi politik nasional ?

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniriy Banda Aceh.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi perpustakaan ilmu politik, terutama yang berkaitan tentang “Pandangan NU Aceh terhadap Politik Tingkat Tinggi NU dalam Kontestasi Politik Nasional”